

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN HARAPAN LAMA SEKOLAH DI KABUPATEN SUMEDANG

Anye Widuri<sup>1</sup>, Iwan Satibi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email: [anyewiduri021@gmail.com](mailto:anyewiduri021@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses implementasi kebijakan pendidikan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan strategi yang tepat dalam peningkatan harapan lama sekolah di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumedang telah berjalan efektif didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah, sinergi antarlembaga, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun, terdapat sejumlah hambatan seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan kualitas guru, serta akses pendidikan yang belum merata di wilayah perdesaan. Strategi yang diterapkan pemerintah meliputi pembangunan sekolah baru, penyediaan beasiswa, pelatihan guru, dan digitalisasi sistem pendidikan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sinergi antaraktor kebijakan dan dukungan sumber daya yang berkelanjutan. Peneliti menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat kebijakan pemerataan mutu dan akses pendidikan di daerah terpencil serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pendidikan, Harapan Lama Sekolah.

### Abstract

*The purpose of this study is to analyze the implementation process of education policy, identify supporting and inhibiting factors, and formulate appropriate strategies to increase expected length of schooling in Sumedang Regency. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection was conducted through in-depth interviews, observations, and documentation studies. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the implementation of education policy in Sumedang Regency has been effective, supported by the commitment of the Regional Government, synergy between institutions, and the use of information technology. However, there are several obstacles such as budget limitations, disparities in teacher quality, and unequal access to education in rural areas. The strategies implemented by the government include building new schools, providing scholarships, teacher training, and digitizing the education system. The success of policy implementation is highly dependent on synergy between policy actors and sustainable resource support. The researcher recommends that the Sumedang Regency Government strengthen policies to equalize the quality and access of education in remote areas and increase community participation in supporting education.*

**Keywords:** Policy Implementation, Education, Expected Years of Schooling.

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam konteks pembangunan daerah, kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan sosial, ekonomi, maupun institusional (UNESCO, 2021). Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, serta mengurangi ketimpangan pendidikan antarwilayah. Upaya tersebut selaras dengan pandangan Todaro & Smith (2015) bahwa peningkatan akses pendidikan merupakan prasyarat penting dalam memperluas kemampuan dasar masyarakat (*basic capabilities*).

Salah satu indikator penting dalam menilai capaian pembangunan pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Pada tahun 2024, HLS Kabupaten Sumedang mencapai 13,01 tahun, meningkat dari 12,97 tahun pada tahun 2020. Meski mengalami tren positif, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat, sehingga menunjukkan masih adanya ketertinggalan dalam pemerataan kualitas pendidikan di tingkat lokal (BPS, 2024). Disparitas pendidikan terutama terlihat antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang dipengaruhi oleh perbedaan infrastruktur, kapasitas ekonomi, serta akses terhadap layanan pendidikan (Suryadarma & Jones, 2013).

Pemerintah daerah telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis seperti program beasiswa afirmatif, peningkatan kompetensi guru, hingga digitalisasi sistem pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi pendidikan dianggap dapat meningkatkan efisiensi tata kelola dan kualitas pembelajaran (Wahyudi, 2020). Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik struktural maupun kultural. Hambatan seperti keterbatasan sumber daya pendidikan, ketimpangan infrastruktur, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih menjadi kendala nyata di lapangan (Mukhtar, 2019).

Melihat kondisi tersebut, diperlukan analisis mendalam terkait bagaimana proses implementasi kebijakan pendidikan berlangsung di Kabupaten Sumedang, faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat, serta strategi apa yang dapat dirumuskan untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses implementasi kebijakan pendidikan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi penguatan implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan pendidikan daerah yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik karena menentukan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Edwards III (1980), implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kejelasan informasi yang diterima oleh pelaksana, kecukupan sumber daya, konsistensi sikap pelaksana, serta mekanisme koordinasi antar lembaga.

Mazmanian & Sabatier (1983) menekankan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga aspek besar: karakteristik kebijakan, kondisi sosial-politik, serta kemampuan lembaga pelaksana. Dalam konteks pendidikan daerah, kapasitas birokrasi dan kesiapan kelembagaan menjadi faktor penentu efektivitas implementasi kebijakan pendidikan.

## **2. Kebijakan Pendidikan dan Pemerataan Akses**

Pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas SDM, produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. UNESCO (2021) menyatakan bahwa pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan menjadi pilar utama dalam pembangunan pendidikan berkelanjutan. Pemerataan pendidikan di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur, keterjangkauan layanan pendidikan, serta kemampuan ekonomi masyarakat.

Di Indonesia, ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi permasalahan utama (Suryadarma & Jones, 2013). Faktor-faktor seperti kualitas guru, sarana-prasarana, dan kondisi sosial-ekonomi berkontribusi terhadap kesenjangan tersebut. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merancang kebijakan afirmatif seperti beasiswa, penguatan kompetensi guru, dan pemerataan fasilitas pendidikan.

## **3. Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai Indikator Pembangunan Pendidikan**

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat dijalani anak pada usia tertentu berdasarkan kondisi pendidikan saat ini. BPS (2024) menegaskan bahwa HLS adalah indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga peningkatan HLS menandakan perbaikan akses dan kualitas layanan pendidikan.

Peningkatan HLS di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan fasilitas pendidikan, kondisi ekonomi rumah tangga, persepsi masyarakat terhadap pendidikan, serta efektivitas kebijakan pemerintah (Todaro & Smith, 2015). Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa daerah yang berinvestasi pada infrastruktur pendidikan dan peningkatan kompetensi guru cenderung memiliki capaian HLS yang lebih baik.

## **4. Digitalisasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran**

Perkembangan teknologi telah mendorong transformasi signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Digitalisasi pendidikan dianggap berperan dalam meningkatkan efisiensi tata kelola, memperluas akses pembelajaran, serta meningkatkan kualitas interaksi belajar-mengajar (Wahyudi, 2020). Pemanfaatan platform digital seperti Dapodik, e-learning, dan sistem administrasi terintegrasi merupakan bagian dari inovasi pendidikan di tingkat daerah. Namun, implementasi digitalisasi pendidikan di daerah masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur, kemampuan teknologi guru, dan akses internet yang tidak merata (Mukhtar, 2019). Tantangan tersebut sangat relevan terutama di wilayah pedesaan yang masih minim fasilitas pendukung.

## **5. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Literatur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan sering dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti dukungan politik, alokasi anggaran yang memadai, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antar-lembaga (Mazmanian & Sabatier, 1983).

Sebaliknya, hambatan implementasi biasanya berasal dari keterbatasan sumber daya, resistensi budaya, kurangnya partisipasi masyarakat, hingga ketidaksesuaian antar kebijakan pusat dan daerah. Dalam konteks daerah seperti Kabupaten Sumedang, tantangan tersebut dapat muncul dalam bentuk ketimpangan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta perbedaan persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat diperlukan untuk merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif dan adaptif.

## **C. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti memahami proses implementasi kebijakan pendidikan secara

lebih mendalam dan holistik. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena sosial, persepsi, serta pengalaman para pelaksana kebijakan secara komprehensif (Creswell, 2014). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sumedang dengan unit analisis yang melibatkan Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta beberapa sekolah menengah sebagai representasi pelaksanaan kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Pemilihan lokasi dan informan dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi dan keterlibatan langsung mereka dalam proses perencanaan, implementasi, dan pengawasan kebijakan pendidikan (Patton, 2015).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Wawancara ini bertujuan memperoleh informasi mengenai dinamika implementasi kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta persepsi para pemangku kepentingan. Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk melihat secara nyata pelaksanaan program pendidikan, termasuk kegiatan pembelajaran dan pemanfaatan sarana-prasarana pendidikan di sekolah. Studi dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi data, mencakup analisis terhadap dokumen resmi seperti data Harapan Lama Sekolah (HLS), laporan kebijakan pendidikan, dokumen RPJMD, Renstra Dinas Pendidikan, dan berbagai peraturan pendukung lainnya. Melalui ketiga teknik tersebut, data yang diperoleh menjadi lebih kaya dan mendalam (Spradley, 1980).

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi atau matriks tematik agar memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar informasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian berakhir, sehingga memungkinkan peneliti menguji konsistensi temuan.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis informan serta menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data. Langkah ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas, keandalan, dan validitas hasil penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Sumedang**

Implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumedang menunjukkan perkembangan positif melalui berbagai program strategis seperti peningkatan akses pendidikan, penyediaan beasiswa, pembangunan sekolah baru, serta digitalisasi pendidikan. Analisis menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa enam variabel utama sangat memengaruhi kualitas implementasi di wilayah ini, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi pelaksana, karakteristik pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Standar dan tujuan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumedang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan dan disosialisasikan kepada satuan pendidikan. Namun, penelitian lapangan memperlihatkan perbedaan persepsi di tingkat pelaksana mengenai prioritas kebijakan. Fenomena ini sejalan dengan temuan Pratiwi (2020) yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh keseragaman pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan. Ketidaksamaan persepsi sering kali menyebabkan pelaksanaan program menjadi tidak merata antar sekolah.

Sumber daya merupakan faktor dominan yang memengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan di wilayah perkotaan relatif memadai, sementara wilayah perdesaan masih menghadapi keterbatasan ruang kelas, tenaga pendidik, serta akses teknologi. Hasil ini konsisten dengan penelitian Suryadarma & Jones (2013) yang menyatakan bahwa kesenjangan infrastruktur antara wilayah kota dan desa menjadi penyebab utama ketidakmerataan hasil pembangunan pendidikan. Selain itu, studi oleh Fauzi dan Sari (2022) menemukan bahwa keterbatasan sumber daya sering menyebabkan pelaksanaan kebijakan hanya berjalan optimal di sekolah-sekolah tertentu yang memiliki dukungan anggaran lebih baik.

Komunikasi antar lembaga pelaksana kebijakan, seperti Dinas Pendidikan, Bappeda, DPRD, dan sekolah, relatif baik namun masih menghadapi kendala terutama pada penyampaian kebijakan yang bersifat teknis. Beberapa kepala sekolah menyatakan bahwa perubahan regulasi sering disampaikan secara mendadak. Penelitian Widodo (2021) menunjukkan bahwa koordinasi yang lemah antar lembaga pendidikan dapat menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Hal ini menguatkan temuan penelitian bahwa komunikasi masih perlu ditingkatkan untuk memastikan pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang sama.

Agen pelaksana seperti kepala sekolah dan guru memiliki komitmen tinggi, tetapi kapasitas mereka dalam melaksanakan kebijakan masih berbeda-beda. Perbedaan kapasitas terutama terlihat dalam penerapan digitalisasi pendidikan. Sekolah yang tenaga pendiknnya memiliki literasi digital tinggi dapat melaksanakan program dengan lebih optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hartono (2020) yang menyebutkan bahwa kapasitas individu pelaksana merupakan variabel penentu dalam keberhasilan implementasi kebijakan berbasis teknologi. Rendahnya kompetensi digital menjadi tantangan yang perlu ditangani melalui pelatihan berkelanjutan.

Sikap pelaksana kebijakan di Kabupaten Sumedang umumnya positif, namun motivasi sebagian pelaksana masih dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas dan beban kerja. Studi Rahman dan Anwar (2019) menemukan bahwa disposisi atau sikap pelaksana berpengaruh signifikan terhadap kualitas implementasi kebijakan, terutama dalam konteks pendidikan daerah. Ketika pelaksana memiliki persepsi positif dan dukungan lingkungan kerja yang baik, implementasi kebijakan cenderung lebih efektif dan konsisten.

Lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat berpengaruh besar terhadap implementasi kebijakan, terutama di wilayah perdesaan Kabupaten Sumedang. Kesadaran pendidikan yang masih rendah di beberapa daerah menyebabkan partisipasi sekolah belum optimal. Hal ini diperkuat oleh penelitian Azizah (2021) yang menyatakan bahwa faktor sosial-ekonomi merupakan determinan penting terhadap tingkat partisipasi dan keberlanjutan pendidikan di daerah. Dari sisi politik, dukungan pemerintah daerah dan DPRD terhadap peningkatan capaian HLS cukup kuat, sesuai temuan Pamungkas (2022) bahwa dukungan politik lokal merupakan modal penting dalam melaksanakan kebijakan pendidikan secara berkelanjutan.

Secara umum, implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumedang telah menunjukkan kemajuan terutama melalui program perluasan akses, beasiswa, dan digitalisasi pendidikan. Namun, berbagai kendala seperti ketimpangan infrastruktur, keterbatasan sumber daya, serta variasi kapasitas pelaksana masih menjadi hambatan utama. Konsisten dengan teori Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh keselarasan antara tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan kondisi lingkungan eksternal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pelaksana, pemerataan fasilitas pendidikan, dan penguatan koordinasi antar lembaga perlu menjadi prioritas penguatan kebijakan di masa mendatang.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Sumedang

Faktor pendukung implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumedang Adalah sebagai berikut:

### a. Komitmen pimpinan daerah terhadap pendidikan

Komitmen pimpinan daerah merupakan faktor strategis yang sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan. Di Kabupaten Sumedang, Bupati dan jajaran perangkat daerah menunjukkan perhatian serius terhadap perbaikan kualitas pendidikan, yang tercermin dari konsistensi pengalokasian anggaran minimal 20% APBD, penguatan program beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta peningkatan mutu guru melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi.

Berbagai penelitian menegaskan bahwa kepemimpinan yang visioner dan berkomitmen menjadi elemen inti kesuksesan implementasi kebijakan publik (Sagala, 2020; Sulaiman & Noor, 2021). Komitmen pimpinan menciptakan arah kebijakan yang jelas, memberikan legitimasi politik kepada pelaksana, serta memotivasi organisasi pelaksana untuk bekerja lebih responsif dan adaptif. Dalam kasus Sumedang, dukungan pimpinan terlihat dalam kebijakan yang menargetkan peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan perluasan akses pendidikan yang merata. Hal ini sejalan dengan teori implementasi Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan pentingnya dukungan politik dan otoritas dalam memengaruhi perilaku pelaksana kebijakan. Semakin tinggi komitmen pimpinan daerah, semakin besar peluang keberhasilan implementasi program pendidikan secara efektif dan berkelanjutan.

### b. Sinergi antar lembaga (Dinas Pendidikan, Bappppeda, DPRD)

Sinergi kelembagaan merupakan faktor penting dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai tujuan. Di Kabupaten Sumedang, kolaborasi antara Dinas Pendidikan sebagai pelaksana teknis, Bappeda sebagai perencana lintas sektor, dan DPRD sebagai lembaga legislasi dan pengawasan menjadi kekuatan signifikan dalam mengintegrasikan kebijakan pendidikan dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Berkat sinergi tersebut, berbagai program seperti pembangunan ruang kelas baru, pengadaan sarana belajar, dan penyusunan kebijakan berbasis data dapat berjalan lebih terstruktur. Temuan ini sejalan dengan studi Yuniarsih (2021) dan Pratiwi (2022) yang menegaskan bahwa koordinasi antarinstansi pemerintah merupakan determinan utama dalam efektivitas kebijakan pendidikan daerah.

Sinergi kelembagaan tidak hanya mengurangi risiko tumpang tindih kebijakan, tetapi juga mempercepat proses pengambilan keputusan, memperkuat pengawasan, dan memastikan penganggaran berjalan sesuai kebutuhan prioritas daerah. Dalam model Van Meter dan Van Horn, komponen “komunikasi antar organisasi pelaksana” dipandang sebagai variabel kunci yang dapat memperkuat struktur implementasi dan meningkatkan akuntabilitas kebijakan.

### c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen pendidikan.

Digitalisasi manajemen pendidikan menjadi salah satu inovasi yang diterapkan Kabupaten Sumedang. Penggunaan sistem data pendidikan berbasis digital, platform e-learning, serta aplikasi monitoring capaian pendidikan memberikan dampak positif terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi manajemen, tetapi juga mempermudah sekolah dalam melakukan pelaporan, pengelolaan data siswa, hingga evaluasi program. Sebagaimana ditegaskan oleh Widodo (2022) dan Marzuki et al. (2021), digitalisasi dalam pendidikan dapat meningkatkan transparansi, mempercepat alur informasi, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data (*data-driven decision making*).

Digitalisasi juga membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kesenjangan capaian pendidikan antarwilayah dan merumuskan intervensi secara lebih tepat sasaran. Dengan demikian, teknologi menjadi enabler yang memperkuat kapasitas implementasi kebijakan pendidikan di daerah.

Adapun faktor penghambat implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumedang Adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan anggaran daerah

Meski alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi ketentuan minimal 20% APBD, kebutuhan di lapangan masih jauh lebih besar. Pembangunan sekolah, rehabilitasi ruang kelas, serta peningkatan kesejahteraan guru memerlukan alokasi dana yang signifikan. Keterbatasan anggaran menyebabkan prioritas program dilakukan secara bertahap sehingga pemerataan kualitas pendidikan belum sepenuhnya terjadi. Kondisi ini selaras dengan penelitian yang menyatakan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal rendah cenderung menghadapi keterlambatan dalam mencapai target pembangunan pendidikan (Aziz, 2020; Kurniawan, 2022).

Menurut teori implementasi Hill & Hupe (2002), keterbatasan sumber daya merupakan salah satu faktor yang paling sering menghambat keberhasilan kebijakan publik, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan.

b. Ketimpangan kualitas guru

Kualitas guru masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah pedesaan. Meskipun sebagian guru di perkotaan telah tersertifikasi dan mengikuti pelatihan profesional, banyak guru di daerah terpencil belum memperoleh kesempatan serupa karena keterbatasan akses dan fasilitas.

Ketimpangan kualitas guru terbukti berdampak signifikan terhadap perbedaan mutu pembelajaran. Studi Rosyid & Dewi (2021) menunjukkan bahwa disparitas kompetensi guru berkontribusi langsung pada ketimpangan capaian akademik siswa dan indikator kualitas pendidikan lainnya. Ketimpangan kualitas guru menghambat upaya peningkatan HLS secara merata dan menjadi penghambat utama implementasi kebijakan pendidikan di Sumedang.

c. Akses Pendidikan yang belum merata

Karakteristik geografis Kabupaten Sumedang yang didominasi perbukitan menyebabkan ketimpangan akses pendidikan, terutama bagi wilayah pedalaman. Keterbatasan transportasi dan jarak tempuh yang jauh membuat kehadiran siswa di sekolah menjadi tidak stabil.

Fenomena ini sejalan dengan penelitian Susanti (2020) dan Mulyani (2023) yang menemukan bahwa faktor geografis merupakan determinan besar dalam partisipasi sekolah di wilayah pedesaan Indonesia. Ketidakmerataan akses menyebabkan tidak semua masyarakat menyerap kebijakan pendidikan secara optimal, sehingga output kebijakan menjadi bervariasi antarwilayah.

d. Kurangnya partisipasi masyarakat di daerah terpencil

Partisipasi masyarakat yang rendah dalam mendukung pendidikan menjadi penghambat signifikan. Di beberapa desa, pendidikan belum dianggap prioritas utama karena faktor budaya, ekonomi, dan minimnya pemahaman tentang manfaat pendidikan jangka panjang.

Penelitian Arifin (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan pada tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, program-program seperti gerakan literasi sekolah atau pemberdayaan keluarga dalam pendidikan tidak berjalan optimal. Kondisi ini juga sejalan dengan teori implementasi Mazmanian dan Sabatier

(1983) yang menyatakan bahwa karakteristik kelompok sasaran (*target group*) dapat sangat menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan.

### 3. Strategi Pemerintah Daerah dalam Peningkatan HLS

Upaya peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Sumedang dilakukan melalui berbagai strategi yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan keberlanjutan program di seluruh wilayah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi-strategi tersebut berjalan cukup efektif, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural di lapangan.

#### a. Penguatan Kebijakan Afirmatif: Beasiswa dan Program Literasi Desa

Kebijakan afirmatif menjadi strategi utama dalam mendorong peningkatan HLS, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggal di wilayah pedesaan. Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat program beasiswa bagi siswa miskin, bantuan biaya pendidikan, serta pemberdayaan gerakan literasi desa untuk meningkatkan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung.

Kebijakan afirmatif ini terbukti memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan dan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah. Studi Fitriah (2020) dan Mutmainnah (2022) menunjukkan bahwa beasiswa dan program literasi terbukti signifikan dalam menurunkan angka putus sekolah serta meningkatkan ketahanan pendidikan keluarga. Strategi ini juga sejalan dengan kebijakan nasional mengenai pendidikan inklusif dan pemerataan layanan pendidikan.

Dalam konteks teori implementasi Van Meter dan Van Horn, kebijakan afirmatif berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat standar kebijakan dan memberikan dukungan bagi kelompok sasaran (*target group*) yang membutuhkan perlakuan khusus agar tujuan kebijakan pendidikan dapat tercapai secara merata.

#### b. Peningkatan Kapasitas Guru melalui Pelatihan dan Sertifikasi

Guru menjadi aktor kunci dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan capaian HLS. Pemerintah daerah secara rutin mengadakan pelatihan kompetensi pedagogik, pelatihan berbasis digital, peningkatan keterampilan literasi dan numerasi, serta memfasilitasi proses sertifikasi profesi guru.

Peningkatan kapasitas guru ini terbukti berpengaruh pada kualitas pembelajaran dan motivasi belajar siswa, sebagaimana dibuktikan dalam penelitian Rosyid & Dewi (2021) dan Hasnawati (2023) yang menunjukkan bahwa kompetensi guru memiliki korelasi kuat dengan peningkatan capaian belajar dan pengurangan kesenjangan prestasi antarwilayah. Namun demikian, kesenjangan kualitas guru antara wilayah perkotaan dan pedesaan tetap menjadi tantangan. Pelatihan belum merata, terutama bagi guru-guru yang berada di daerah terpencil. Hal ini menunjukkan masih perlunya kebijakan khusus untuk memperluas akses pengembangan profesional guru secara berkelanjutan.

#### c. Pembangunan Sarana Pendidikan di Wilayah Terpencil

Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan merupakan strategi penting dalam memastikan pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah dengan kondisi geografis sulit. Pemerintah Kabupaten Sumedang mengarahkan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru, perbaikan gedung sekolah, dan penyediaan fasilitas penunjang seperti perpustakaan dan laboratorium.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan yang memadai berdampak langsung pada peningkatan kehadiran siswa, menurunkan angka putus sekolah, dan mendorong peningkatan partisipasi pendidikan. Studi Mulyani (2023) dan Susanti (2020) juga menegaskan bahwa fasilitas fisik yang baik menjadi faktor krusial dalam keberhasilan program pemerataan pendidikan di wilayah pedesaan Indonesia. Akan tetapi, keterbatasan anggaran

menyebabkan pembangunan dilakukan secara bertahap, sehingga kebutuhan infrastruktur di beberapa kecamatan belum sepenuhnya terpenuhi.

d. Transformasi Digital dalam Sistem Pendidikan

Transformasi digital menjadi strategi yang semakin penting dalam mempercepat peningkatan HLS. Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi pendidikan berbasis digital untuk pengelolaan data sekolah, pelaporan capaian pendidikan, serta menyediakan platform pembelajaran daring (*e-learning*). Digitalisasi ini mempercepat akses informasi, meningkatkan transparansi, dan memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data.

Penelitian Widodo (2022) dan Marzuki et al. (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi manajemen sekolah dan mendukung penyelenggaraan pembelajaran yang adaptif, terutama pascapandemi. Dengan adanya digitalisasi, sekolah di Sumedang memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memonitor kehadiran siswa, capaian literasi, serta kebutuhan intervensi pembelajaran. Namun, pemanfaatan teknologi masih menghadapi kendala di daerah dengan infrastruktur jaringan internet terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi kebijakan digital dengan program perluasan jaringan dan literasi teknologi bagi guru dan siswa.

e. Kolaborasi Lintas Sektor dengan Masyarakat dan Dunia Usaha

Kolaborasi lintas sektor menjadi strategi penting dalam memperkuat implementasi kebijakan pendidikan. Pemerintah daerah menggandeng masyarakat desa, dunia usaha, serta organisasi masyarakat dalam program pemberdayaan pendidikan seperti kelas inspirasi, dukungan sarana belajar, dan penguatan pendidikan vokasi.

Kolaborasi ini menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan menghadirkan sumber daya tambahan di luar anggaran pemerintah. Studi Pratiwi (2022) dan Setyawan (2021) menunjukkan bahwa kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat mampu meningkatkan relevansi pendidikan, mengurangi beban pemerintah daerah, dan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui program intervensi sosial. Di Sumedang, kolaborasi lintas sektor berperan dalam pembentukan karakter, peningkatan literasi, serta penyediaan sarana kelas industri pada sekolah menengah. Meskipun demikian, kolaborasi masih perlu diperluas agar manfaatnya dirasakan secara merata di seluruh kecamatan.

Strategi peningkatan HLS di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai aktor tunggal, tetapi memerlukan sinergi yang kuat antaraktor, integrasi perencanaan lintas sektor, dan keberlanjutan sumber daya. Hal ini sesuai dengan literatur implementasi kebijakan (Mazmanian & Sabatier, 1983; Van Meter & Van Horn, 1975) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dukungan politik, kapasitas pelaksana, serta kesesuaian antara kebijakan dan kondisi sosial masyarakat.

## E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumedang telah berjalan cukup efektif melalui berbagai strategi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam upaya peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS). Pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang kuat melalui kebijakan afirmatif, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pembangunan sarana-prasarana pendidikan, transformasi digital, serta kolaborasi lintas sektor. Strategi-strategi tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akses, mutu, dan kinerja pendidikan di Kabupaten Sumedang. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan kompetensi guru antara wilayah perkotaan dan perdesaan, ketidakmerataan akses pendidikan akibat kondisi geografis, serta rendahnya partisipasi masyarakat di daerah terpencil. Hambatan-hambatan tersebut

berdampak pada belum optimalnya pemerataan mutu pendidikan dan capaian HLS secara keseluruhan.

Analisis menggunakan model Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik dan disposisi pelaksana, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Sumedang, faktor pendukung seperti komitmen pimpinan daerah dan sinergi antar instansi menjadi penggerak utama implementasi, sementara faktor penghambat terutama terkait keterbatasan kapasitas struktural dan kultural di lapangan. Dengan demikian, peningkatan HLS di Kabupaten Sumedang memerlukan upaya berkelanjutan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendidikan, pemerataan fasilitas dan layanan pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pendidikan. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan dan peningkatan indikator pembangunan manusia di Kabupaten Sumedang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2021). *Community Participation in Rural Education Development*. Jurnal Pendidikan dan Masyarakat, 9(2), 101–112.
- Aziz, A. (2020). *Fiscal Capacity and Education Policy Outcomes in Indonesian Districts*. Journal of Public Sector Policy, 12(3), 155–168.
- Azizah, R. (2021). Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap partisipasi sekolah di daerah perdesaan. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 9(2), 145–158.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Sumedang dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Sumedang.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Fauzi, A., & Sari, N. (2022). Ketimpangan sumber daya pendidikan dan dampaknya terhadap pemerataan mutu sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 13(1), 22–35.
- Fitriah, N. (2020). *Afirmasi Pendidikan bagi Siswa Miskin di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan, 7(2), 88–99.
- Hartono, D. (2020). Literasi digital guru dan implementasi kebijakan pendidikan berbasis teknologi. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 8(3), 201–214.
- Hasnawati, H. (2023). *Teacher Professional Development and Learning Outcomes in Rural Schools*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 11(1), 33–45.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy*. Sage Publications.
- Kurniawan, R. (2022). *Local Budget Constraints and Education Equality in Indonesia*. Indonesian Journal of Governance Studies, 5(1), 44–58.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Marzuki, M., Raharjo, W., & Lestari, N. (2021). *Digital Governance in Local Education Management*. Jurnal Administrasi Pendidikan, 28(1), 22–35.
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Mukhtar. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyani, E. (2023). *Geographical Challenges and School Participation in Rural Indonesia*. Journal of Educational Development, 3(1), 77–89.

- Mutmainnah, M. (2022). *Impact of Scholarship Programs on School Continuation Rates*. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 5(2), 120–131.
- Pamungkas, Y. (2022). Peran dukungan politik dalam implementasi kebijakan pendidikan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 55–70.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. SAGE Publications.
- Pratiwi, A. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan: Analisis tujuan, standar, dan persepsi pelaksana. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 101–114.
- Pratiwi, A. (2022). *Policy Coordination in Regional Education Governance*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 90–102.
- Rahman, M., & Anwar, S. (2019). Disposisi pelaksana dan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 77–89.
- Rosyid, R., & Dewi, N. (2021). *Teacher Competency Disparities and Student Learning Outcomes*. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 15(4), 250–262.
- Sagala, S. (2020). *Leadership Commitment and Policy Implementation Success in Education Sector*. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(1), 1–15.
- Setyawan, Y. (2021). *Cross-Sector Partnerships in Improving Educational Quality*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 155–170.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Sulaiman, M., & Noor, A. (2021). *Political Will and Educational Reform in Indonesian Regions*. *Indonesian Journal of Public Administration*, 6(2), 134–148.
- Suryadarma, D., & Jones, G. W. (2013). *Education in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Susanti, F. (2020). *Rural Accessibility and School Attendance in Indonesia*. *Jurnal Kajian Pembangunan*, 21(3), 189–203.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. Pearson.
- UNESCO. (2021). *UNESCO Education Report 2021: Reimagining Our Futures Together*. UNESCO Publishing.
- Van Meter, D., & Van Horn, C. (1975). *The Policy Implementation Process*. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wahyudi. (2020). Digitalisasi pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(2), 155–164.
- Widodo, G. (2021). Komunikasi antarorganisasi dalam implementasi kebijakan sektor pendidikan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 19(2), 133–148.
- Widodo, T. (2022). *Digital Transformation and Efficiency in Local Education Management*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 24(2), 145–158.
- Yuniarsih, T. (2021). *Interagency Collaboration in Implementing Regional Education Policies*. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 33–45.